

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. *Legitimate Theory* (Teori Legitimasi)

Dowling dan Pfeffer yang merupakan tokoh pencetus teori legitimasi memaparkan bahwa teori legitimasi tidak bisa hanya didefinisikan dengan “apa yang legal dan ilegal”. Selain itu, teori legitimasi berusaha untuk memastikan bahwa nilai-nilai sosial yang terkandung dalam suatu organisasi selaras dengan norma-norma yang berlaku di lingkungan sosial dimana organisasi atau lingkungan sosial itu sendiri..¹ Sebuah organisasi yang bergerak di masyarakat memiliki kontrak sosial baik secara tersurat maupun tersirat yang akan digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan apakah output yang dihasilkan telah sesuai dengan lingkungan sekitar sehingga perusahaan dapat *survive* dan sejalan dengan keinginan masyarakat umum.² kontrak sosial ini juga dapat diartikan sebagai batasan norma dan sistem operasional perusahaan yang ada di tengah masyarakat.³ Konsep “kontrak sosial” antara entitas tau organisasi dan masyarakat sangat dipertimbangkan saat berinteraksi.⁴ Hal tersebut dapat disebabkan karena dalam praktiknya, legitimasi berpotensi meningkatkan nilai perusahaan. Kontrak sosial dalam hal ini tidak mudah untuk didefinisikan, akan tetapi konsepnya difungsikan untuk mewakili banyak ekspektasi implisit dan eksplisit yang ada di masyarakat tentang bagaimana suatu organisasi maupun entitas harus menjalankan operasionalnya.

¹ John Dowling and Jeffrey Pfeffer, “*Organizational Legitimacy: Social Values and Organizational Behavior*,” *Pacific Sociological Review* 18, no. 1 (1975): 122–36, <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/1388226>.

² Dennis M Patten, “Intra-Industry Environmental Disclosures in Response to the Alaskan Oil Spill: A Note on Legitimacy Theory,” *Accounting, Organizations and Society* 17, no. 5 (1992): 471–72, [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0361-3682\(92\)90042-Q](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0361-3682(92)90042-Q).

³ David Campbell, “Legitimacy Theory or Managerial Reality Construction? Corporate Social Disclosure in Marks and Spencer PLC Corporate Reports 1969–1997,” *Accounting Forum* 24, no. 1 (2002): 80–100, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1111/1467-6303.00030>.

⁴ Bo Bae Choi, Lee Doowon, and Jim Psaros, “An Analysis of Australian Company Carbon Emission Disclosure,” *Pacific Accounting Review* 25, no. 1 (2013).

Ada tiga hal yang menjadi alasan mengapa terjadinya korelasi tidak sempurna terkait hukum dan norma atau nilai sosial menurut Dowling dan Pfeffer.⁵ Pertama, hukum biasanya dipandang sebagai representasi dari nilai norma masyarakat. Namun, sistem yang berasal dari hukum formal mungkin sedikit lebih lambat menyesuaikan diri dengan nilai dan norma masyarakat yang sering berubah. Kedua, sistem yang legal bergantung pada konsistensi berlainan dengan aturan yang bersifat kontradiktif. Ketiga, masyarakat mungkin dapat mentoleransi perilaku tertentu tetapi pasti tidak menginginkan perilaku tersebut membuahkan aturan hukum tertulis.

Lindblom menjabarkan teori legitimasi sebagai:

“...suatu status maupun kondisi dimana ketika sistem nilai suatu entitas sejalan dengan sistem nilai dari sistem sosial yang lebih besar yang mana suatu entitas tersebut menjadi bagian didalamnya. Ketika muncul perbedaan, actual, maupun potensial, berada di antara dua sistem nilai, adanya ancaman terhadap legitimasi entitas”

Lindblom juga membedakan antara legitimasi yang dianggap status atau kondisi dari legitimasi yang dianggap sebagai suatu proses yang dapat membuat suatu organisasi yang dianggap sah.⁶

Teori legitimasi juga erat kaitannya dengan pengungkapan lingkungan dan sosial sebagai implementasi akuntabilitas perusahaan terhadap publik dalam menyampaikan dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan.⁷ Teori ini membuktikan bahwa hubungan antara para pemangku kepentingan dan konsep yang sah, dan dijelaskan juga bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial memberikan dampak yang relevan dengan reputasi perusahaan.⁸ Legitimasi bisa diterapkan dalam penelitian

⁵ Dowling and Pfeffer, “Organizational Legitimacy: Social Values and Organizational Behavior.”

⁶ C. K Lindblom, “The Implication of Organisational Legitimacy for Corporate Social Performance and Disclosure,” *Critical Perspectives on Accounting Convergence*, 1994.

⁷ Ni Made Deviarini Putri, Animah, and Widia Astuti, “Pengaruh Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Bursa Efek Indonesia,” *E-Jurnal Akuntansi* 32, no. 4 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i04.p11>.

⁸ Juniati Gunawan and Hermawan Susilo, “Corporate Social Responsibility, Corporate Reputation, and Share Price: A Study of Consumer Goods Industries Using Sustainable Accounting Standard Board (SASB) Disclosures,” *Jurnal*

akuntansi sosial dan lingkungan, hal tersebut karena legitimasi berkaitan dengan dengan sistem nilai organisasi dan sosial yang lebih luas.⁹ Oleh sebab itulah perusahaan harus selalu berjalan beriringan dengan nilai sosial dan norma perilaku yang dapat diterima dalam sistem sosial yang berhubungan dengan operasional mereka.

Imam Ghozali menjabarkan teori legitimasi sebagai teori yang yang dalam penerapannya mempertegas bahwa entitas bisnis atau organisasi harus bisa menumbuhkan citra positif perusahaan menyangkut proses operasional perusahaan yang sesuai dengan peraturan, norma dan batasan yang dianggap sah.¹⁰ Perusahaan akan semakin faham bahwa ketergantungannya terhadap masyarakat serta lingkungan tempat operasionalnya bisa mempengaruhi kelangsungan dan kelancaran perusahaan dalam jangka panjang.¹¹ Teori legitimasi akan berfokus pada apa yang menjadi harapan masyarakat umum.¹² Proses legitimasi diharapkan untuk dapat mempengaruhi persepsi publik dan hal ini bergantung pada strategi legitimasi apa yang digunakan oleh organisasi atau entitas tersebut.¹³ *carbon emission disclosure* merupakan wujud keseriusan perusahaan dan komitmennya dalam melakukan mitigasi perubahan iklim serta menjaga legitimasi. Penyampaian secara positif *carbon emission disclosure* kepada masyarakat umum juga akan berdampak bagi perusahaan dalam

Magister Akuntansi Trisakti 9, no. 1 (2022): 37–54, <https://doi.org/10.25105/jmat.v9i1.8841>.

⁹ Charl de Villiers and Chris J Van Staden, “Can Less Environmental Disclosure Have a Legitimising Effect? Evidence from Africa,” *Accounting, Organizations and Society* 31, no. 8 (2006): 763–81.

¹⁰ Imam Ghozali, *25 Grand Theory*, 1st ed (Yogyakarta: Yoga Pratama, 2020).

¹¹ Sri Mulyani, Kusmuriyanto, and Trisni Suryarini, “Analisis Determinan Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia,” *Jurnal RAK (Riset Akuntansi Keuangan)*, 2017, 54–64, <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/RAK/article/view/500>.

¹² Yingjun Lu and Indra Abeysekera, “Stakeholders’ Power, Corporate Characteristics, and Social and Environmental Disclosure: Evidence from China,” *Journal of Cleaner Production* 64, no. 1 (2014): 426–36, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.10.005>.

¹³ N O’Sullivan and B O’Dwyer, “Stakeholder Perspectives on a Financial Sector Legitimation Process: The Case of NGOs and the Equator Principles,” *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 4, no. 22 (2009): 553–587, <https://doi.org/10.1108/09513570910955443>.

upaya ikut andil dalam melestarikan dan menjaga lingkungan sekitar.

2. *Stakeholder Theory* (Teori Pemangku Kepentingan)

Stakeholder adalah orang atau kelompok yang memiliki kemampuan untuk dipengaruhi atau mempengaruhi suatu pencapaian yang menjadi tujuan perusahaan.¹⁴ Deegan menyatakan bahwa Teori *stakeholder* adalah teori yang memberikan pandangan tentang seharusnya perilaku seorang manajer yang mempertimbangkan segala hal bahwa setiap kelompok memiliki perspektif yang berbeda terhadap perusahaan.¹⁵

Freeman mendefinisikan *stakeholder* sebagai seluruh lapisan kelompok maupun individu yang bisa mempengaruhi dan dipengaruhi oleh tujuan akhir sebuah organisasi atau entitas yaitu sebuah pencapaian.¹⁶ Jajaran yang disebut *stakeholder* mulai dari pemegang saham, karyawan, kreditur, pemasok, pelanggan, kelompok publik dan badan-badan pemerintahan.¹⁷ Seluruh *stakeholder* mempunyai hak untuk segala informasi terkait aktivitas perusahaan yang memengaruhi mereka. Sedangkan menurut Clarkson membagi definisi *stakeholder* menjadi dua yaitu sebagai berikut:¹⁸

1. *Stakeholder* primer yaitu kelompok maupun individu yang mempengaruhi entitas perusahaan untuk dapat bertahan dalam keberlangsungan usahanya (*going concern*).
2. *Stakeholder* sekunder merupakan mereka yang dapat mempengaruhi maupun dipengaruhi perusahaan tapi perusahaan dan pemangku kepentingan akan sangat bergantung pada satu sama lain, mereka tidak memiliki

¹⁴ Robert Edward Freeman, "The Politics of Stakeholder Theory: Some Future Directions," *Business Ethics Quarterly* 4, no. 4 (1994): 409–21.

¹⁵ Craig Deegan, "Introduction: The Legitimising Effect of Social and Environmental Disclosures-a Theoretical Foundation," *Accounting, Auditing & Accountability Journal* 15, no. 3 (2000): 1282–1311.

¹⁶ Robert Edward Freeman, *Strategic Management: A Stakeholder Perspective* (Boston: Pitman, 1984).

¹⁷ Florence Depoers, Thomas Jeanjean, and Tiphaine Jerome, "Voluntary Disclosure Of Greenhouse Gas Emissions: Contrasting The Carbon Disclosure Project And Corporate Reports," *Journal Of Business Ethics* 134, no. 3 (2016): 445–61, <https://doi.org/10.1007/s10551-014-2432-0>.

¹⁸ Max E Clarkson, "A Stakeholder Framework For Analyzing And Evaluating Corporate Social Performance," *Academy Of Management Review* 20, no. 1 (1995): 92–117.

hubungan secara langsung dengan transaksi yang ada di perusahaan, seperti contohnya media massa dan masyarakat luas.

Ghozali dan Chariri mengungkapkan bahwa teori *stakeholder* memiliki arti bahwa suatu entitas atau perusahaan tidak hanya berjalan untuk kepentingan pribadi tetapi harus memberikan kemanfaatan terhadap *stakeholdernya* (investor, supplier, konsumen, kreditor, pemerintah, masyarakat, analisis serta pihak lain). Oleh karena itu eksistensi suatu perusahaan akan sangat dipengaruhi dukungan dari *stakeholdernya*.¹⁹ *Stakeholder* pada hakikatnya bisa mengendalikan dan mempengaruhi jalannya suatu perusahaan. Kemampuan untuk mengurangi penggunaan sumber ekonomi yang terbatas (modal dan tenaga kerja) menentukan kekuatan pemangku kepentingan.²⁰ Gray menyatakan bahwa semakin *powerful* suatu *stakeholder*, sehingga perusahaan akan berupaya untuk menyesuaikan diri agar kelangsungan hidup perusahaan semakin besar.²¹ Teori *stakeholder* juga mengakui hubungan perusahaan dengan seluruh pemangku kepentingan harus dikelola guna mempertahankan legitimasi.²²

Teori ini mengasumsikan bahwa penciptaan nilai merupakan bagian dari bisnis.²³ Penciptaan nilai dapat dijalankan oleh seluruh pemangku kepentingan, seperti halnya pengorbanan *stakeholder* utama dan investor sebagai pemangku kepentingan utama harus dilakukan tetapi tetap melalui koordinasi bersama.²⁴

¹⁹ Imam Ghozali and Anas Chairi, *Teori Akuntansi* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007).

²⁰ Craig Deegan, Michaela Rankin, and Peter Voght, “Firms’ Disclosure Reactions to Major Social Incidents: Australian Evidence”, *Accounting Forum* 24, no. 1 (2000): 101–30, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1111/1467-6303.00031>.

²¹ Rob Gray, Reza Kouhy, and Simon Lavers, “Corporate Social and Environmental Reporting A Review of the Literature and a Longitudinal Study of UK Disclosure” 8, no. 2 (1995): 47–77.

²² Somaiya Yunus, Eljido-Ten E, and Abhyawasana, “Determinants of Carbon Management Strategy Adoption Evidence from Australia’s Top 200 Publicly Listed Firms,” *Managerial Auditing Journal* 31, no. 2 (2020): 156–79.

²³ R. Edward Freeman, Andrew C Wicks, and Bidhan Parmar, “Stakeholder Theory and ‘The Corporate Objective Revisited,’” *Organization Science* 15, no. 3 (2004): 364–69, <https://doi.org/https://doi.org/10.1287/orsc.1040.0066>.

²⁴ Robin W Roberts, “Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosure: An Application of Stakeholder Theory,” *Accounting, Organizations and Society* 17, no. 6 (1992): 595–612.

Teori *stakeholder* dibagi menjadi dua yaitu *ethical branch* dan *managerial branch*.²⁵

1. *Ethical Branch*

Ethical Branch merupakan cabang dari teori *stakeholder* yang menjelaskan bagaimana seharusnya perusahaan bertanggungjawab kepada *stakeholdernya*. Kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi atas usaha suatu perusahaan untuk mencapai tujuannya.²⁶

2. *Managerial Branch*

Managerial Branch adalah cabang teori *stakeholder* yang memperjelas bahwa suatu entitas perusahaan memiliki kebutuhan untuk dapat mengelola kepentingan dari setiap kelompok *stakeholdernya*. Kelompok yang memiliki pengendalian tertinggi atas sumber daya akan paling diutamakan oleh perusahaan.²⁷ *Managerial branch* memuat elemen informasi utama yang bisa digunakan oleh entitas perusahaan untuk mengatur ataupun memanipulasi pemangku kepentingan yang bertujuan mendapatkan persetujuan dan dukungan mereka sebagai salah satu cara melawan dan menghaqdapi pihak yang bertentangan dengan perusahaan.²⁸

Stakeholder menjelaskan perspektifnya bahwa nilai dapat tercipta jika perusahaan dapat menemukan apa yang diinginkan oleh semua pemangku kepentingannya.²⁹ Hal ini nanti yang akan menjadi pondasi kuat perusahaan dan *stakeholdernya* untuk saling berjalan ke arah yang sama, bukan mencari *trade off* antara keduanya. Teori ini dapat membantu mengidentifikasi kelompok yang dinilai cukup relevan dengan keputusan manajemen. Pengungkapan emisi karbon juga termasuk salah satu pendekatan

²⁵ James Guthrie and Lee D Parker, "Corporate Social Reporting: A Rebuttal of Legitimacy Theory," *Accounting and Business Research* 19, no. 76 (1989): 343–52.

²⁶ Freeman, Wicks, and Parmar, "Stakeholder Theory and 'The Corporate Objective Revisited.'"

²⁷ Roberts, "Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosure: An Application of Stakeholder Theory."

²⁸ Sandra Van der Laan, "The Role of Theory in Explaining Motivation for Corporate Social Disclosures: Voluntary Disclosures vs' Solicited disclosures," *Australasian Accounting Business & Finance* 3, no. 4 (2009).

²⁹ Adriana Schiopoiu Burlea and Ion Popa, "Legitimacy Theory Encyclopedia of Corporate Social Responsibility," 2013, 579–84.

yang digunakan pemangku kepentingan dalam rangka mempertahankan hubungan yang kuat dengan *stakeholdernya*.

Untuk memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan, entitas manajer akan menyajikan pengungkapan emisi karbon sebagai informasi tentang kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan polusi dan mitigasi perubahan iklim. Hal tersebut menjadi dasar bagi para investor untuk mempelajari risiko mereka dalam membuat keputusan investasi³⁰

3. *Carbon Emission Disclosure*

a) *Carbon Emission (Emisi Karbon)*

Menurut Kementerian Lingkungan Hidup emisi gas rumah kaca adalah suatu proses lepasnya emisi gas rumah kaca (GRK) menuju atmosfer pada suatu area dalam jangka waktu tertentu.³¹ Adanya gas rumah kaca (GRK) di atmosfer menyebabkan dampak efek pemanasan yang dikenal sebagai efek rumah kaca. Perjanjian Internasional telah menyetujui untuk mengurangi beberapa jenis gas utama. Gas tersebut di antaranya adalah karbon dioksida (CO₂), nitrous oksida (N₂O) dan metana (CH₄).

Hal tersebut disebabkan oleh penggunaan bahan bakar fosil yang meningkat di industri dan produksi industri, transportasi serta emisi barang dan jasa yang digunakan masyarakat luas. Menurut Belkhir dan Elmeligi kontribusi TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) memiliki jejak karbon yang luar biasa.³² Dibandingkan dengan komputer dan laptop, emisi smartphone meningkat menjadi 11% pada tahun 2020.³³ Di sisi lain, aktivitas perusahaan merupakan salah satu sumber emisi karbondioksida.

³⁰ Jaggi et al., “*The Factors Motivating Voluntary Disclosure of Carbon Information : Evidence Based on Italian Listed Companies.*”

³¹ Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, *PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA*, 2017.

³² Lotfi Belkhir and Ahmed Elmeligi, “*Assessing ICT Global Emissions Footprint: Trends to 2040 & Recommendations,*” *Journal of Cleaner Production* 177 (2018): 448–63, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.12.239>.

³³ Lindungi Hutan, “Emisi Karbon: Penyebab, Dampak Dan Cara Mengurangi,” Lindungi Hutan, 2022, <https://lindungihutan.com/blog/emisi-karbon/>.

b) *Carbon Emission Disclosure* (Pengungkapan Emisi Karbon)

Industri-industri besar akan lebih ditekankan pada pengurangan emisi karbon, hal tersebut merupakan alternatif yang akan membuat laporan pengungkapan emisi karbon. Negara-negara maju sudah biasa melakukan pengungkapan emisi karbon ini, hal tersebut yang mendorong entitas perusahaan berupaya ikut andil dalam pengungkapan sukarela setiap periode sebagai bentuk kepedulian sosial lingkungan.³⁴

Carbon emission disclosure merupakan salah satu pengungkapan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, dimana suatu entitas perusahaan akan mengungkapkannya dalam laporan yang terkait risiko dan intensitas gas rumah kaca serta dampaknya terhadap perubahan iklim.³⁵ Astiti dan wirama berpendapat bahwa pengungkapan lingkungan yang berkaitan dengan emisi karbon masih bersifat sukarela sehingga masih banyak perusahaan di Indonesia belum mengungkapkan emisi karbon yang dihasilkan oleh perusahaannya.³⁶ Pengungkapan emisi karbon pada perusahaan akan mendorong investor dalam menilai kinerja lingkungan perusahaan dan mengurangi risiko terhadap permasalahan lingkungan hidup.³⁷ Respon dari para investor akan mengarah ke positif jika perusahaan melakukan pengungkapan kinerja lingkungan dengan transparan.³⁸

³⁴ Komang Adi Kurniawan Saputra, Ni Putu Riski Martini, and Putu Dian Pradnyanitasari, *Akuntansi Sosial Dan Lingkungan* (Sidoarjo: Indomedia Pustaka, 2019).

³⁵ Julia Cotter, Muftah Mohammed Najah, and Shihui Sophie Wang, “Standardized Reporting of Climate Change Information in Australia,” *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal* 2, no. 2 (2011): 294–321.

³⁶ Ni Nengah Witri Astiti and Dewa Gede Wirama, “Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pengungkapan Emisi Karbon Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia,” *E-Jurnal Akuntansi* 30, no. 7 (2020): 1796, <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i07.p14>.

³⁷ Amrie Firmansyah et al., “Respon Pasar Atas Pengungkapan Emisi Karbon Di Indonesia: Bagaimana Peran Tata Kelola Perusahaan?,” *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti* 8, no. 2 (2021): 151–170.

³⁸ Andi Nurlailiah Hamdiyani, “The Effect of Profitability and Environmental Performance on the Disclosure of Carbon Emissions With Managerial Ownership As a Moderating Variable,” *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti* 10, no. 1 (2023): 99–118, <https://doi.org/10.25105/jmat.v10i1.15388>.

Pengungkapan emisi karbon mencakup tiga cakupan utama, yakni cakupan (*scope*) pertama meliputi emisi langsung yang berasal dari pembakaran serta aktivitas operasional industri, cakupan (*scope*) kedua meliputi emisi tidak langsung yang bersumber dari pembelian dan penggunaan energi listrik, dan cakupan (*scope*) yang ketiga meliputi emisi yang ada pada pemakaian lainnya seperti pembelian dan perbaikan komponen transportasi.³⁹

4. *Maqashid syari'ah* dalam bidang lingkungan

masyarakat merupakan peranan penting yang bertindak sebagai khalifah di muka bumi untuk menjaga lingkungan. Prioritas utamanya adalah kesadaran lingkungan untuk tetap menjaga keseimbangan alam. Tanggung jawab dan amanah dalam memakmurkan bumi adalah tugas manusia sebagai khalifah di dunia. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah : 30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝⁴⁰

“Dan (ingatlah) ketika tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi”. Apakah engkau hendak menadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah disana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan mensucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”⁴⁰

Fikih al-bi'ah adalah pembahasan terkait lingkungan yang merujuk dari fikih. Dalam fikih al-bi'ah di bahas mengenai lingkungan. Pokok masalah yang di bahas dalam *fikih al-bi'ah* serta *green economy* adalah perihal kerusakan alam yang terjadi di muka bumi, seperti halnya mulai meningkatnya kemasakan produk yang tidak *eco-friendly*, kerusakan hutan baik disengaja maupun tidak disengaja, tingkat polusi udara yang semakin tinggi akibat emisi karbon, dan hal lain yang menyebabkan perubahan

³⁹ Christian Blanco, Felipe Caro, and Charles J Corbett, “An inside Perspective on Carbon Disclosure” *Business Horizons* 60, no. 5 (2017): 635–646, <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2017.05.007>.

⁴⁰ Kementerian Agama, *Al-Quran Dan Terjemahan*.

iklim di dunia.⁴¹ Pelestarian lingkungan yang mengacu dari maqashid syariah meliputi beberapa hal yakni pemeliharaan iman, akal, jiwa, harta, dan keturunan.⁴² Kehidupan di muka bumi ini akan terpelihara dengan baik jika memelihara lingkungan hidup, yang merupakan bagian dari kewajiban agama.⁴³

Konstruksi Fiqih Industri lingkungan (*fiqh al bi'ah shina'iyah*) dapat menjadi alternatif dalam upaya pelestarian dan pemulihan lingkungan karena dikaitkan dengan konsep konservasi dan restorasi lingkungan industri yang berkah yang berasaskan maqashid syari'ah untuk memperoleh manfaat di dunia dan akhirat. Perspektif lain juga menjelaskan bahwa ekonomi syariah akan selalu menekankan pentingnya pendekatan agama termasuk produk hukum dalam rangka menjaga keseimbangan lingkungan.⁴⁴ Perspektif *fiqh al-bi'ah shina'iyah* konsep yang dipaparkan adalah halal haramnya konsep konservasi dan restorasi lingkungan dimana bermakna halal apabila segala sesuatunya berjalan baik dan menguntungkan bagi masyarakat, dan akan bermakna haram apabila membahayakan dan merusak lingkungan bahkan masyarakat. Formulasi khusus yang membahas tentang penjagaan lingkungan (*hifz al-bi'ah*) yang termuat dalam fiqh al-bi'ah menjadi isu penting yang harus di pertimbangkan sebagai salah satu konsep penjagaan manusia (*hifz al-nas*).⁴⁵ Semua konsep yang telah di ramu melalui fiqh al-bi'ah shina'iyah tidak akan bisa berjalan apabila tidak didampingi oleh pemerintah sebagai regulator utama dan pemangku kewenangan.

Konsep *maqhasid syariah* memiliki keselarasan dengan kewajiban menjaga lingkungan hidup yang merupakan wujud dari kemaslahatan terhadap manusia dan kemaslahatan merupakan inti yang paling ubertama dari *maqhasid syariah*.⁴⁶

⁴¹ Ridan Muhtadi et al., "Tinjauan Maqashid Syariah Dan Fiqh Al-Bi'ah Dalam Green Economy," *Jurnal Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2019): 242–259.

⁴² Arif Sugitanata, "Integrasi Fiqh Lingkungan terhadap Pembaharuan Konsep Maqashid Syari'ah," *EL-Hekam: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 2 (2021): 78–85, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31958/jeh.v6i2.2713>.

⁴³ Suryani, "Pengarusutamaan *Hifdh Al-'Alam* Sebagai Bagian Dari Maqasid," *Al Tahrir* 2, no. 17 (2017): 353–370.

⁴⁴ Ifdlolul Maghfur, "Fiqh Industri Lingkungan (Studi: Maqhasid Al-Syari'ah Barokah)". *Malia* 8, no. 1 (2016): 61–84.

⁴⁵ Suryani, "Penegasan *Hifd Al-'Alam* Sebagai Bagian Dari *Maqāshid Al-Sharī'ah*," *Al-Tahrir* 17, no. 2 (2017): 353–70.

⁴⁶ Muhammad Ramadhan, "*Maqasid Syari'ah* dan Lingkungan Hidup (*Bahtsul Masa'il* Sebagai Perlawanan Kaum Santri Terhadap Eksploitasi

5. Regulator

Pemerintah merupakan regulator utama yang memiliki wewenang dalam pengawasan dan penekanan perusahaan agar ikut andil dalam program pelestarian lingkungan melalui *carbon emission disclosure*.⁴⁷ Dengan adanya keberadaan pemerintah yang akan mengatur seluruh keharusan yang wajib ada di setiap prose kehidupan masyarakat. Oleh karena itu peran dan fungsi pemerintah dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sangat erat hubungannya.⁴⁸

Bagir Manan mengungkapkan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas kesejahteraan negara yang dapat diartikan secara sempit maupun secara luas. Pemerintah dalam definisi terbatas adalah pemangku jabatan yang bertindak sebagai pelaksana eksekutif atau sebagai penyelenggara administrasi negara.⁴⁹ Regulator juga disebut sebagai pemangku jabatan pemerintah yang memiliki otoritas untuk membuat kebijakan dan peraturan untuk kepentingan negara dan masyarakat.

Pemerintah selaku pengelola yang memiliki kewenangan dan kebijakan untuk menekan industri agar bertanggung jawab terhadap dampak yang akan diberikan kepada lingkungan termasuk pengungkapan emisi karbon. Pemerintah harus memberikan perhatian yang lebih terhadap permasalahan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan industri.⁵⁰ Sedangkan menurut Labobo peranan pemerintah adalah pelayan masyarakat yang tidak memiliki tujuan yang mengarah pada profit atau

Pertambahan Emas di Silo Jember),” *Journal Analytica Islamica* 21, no. 2 (2019): 126–137.

⁴⁷ Robbby Priyambada Suhardi and Agus Purwanto, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Emisi Karbon Di Indonesia (Studi Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2013),” *Diponegoro Journal of Accounting* 4, no. 2 (2015): 836–848.

⁴⁸ Licya Fransisca, *Pengaruh Media Exposure, Tipe Industri, Profitabilitas, Regulator, Size, Leverage, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Carbon Emission Disclosure* (Studi Pada Perusahaan Non Keuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 - 2018) (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Darmajaya, 2020).

⁴⁹ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah* (Jogjakarta: Pusat Studi Hukum FH UII, 2001).

⁵⁰ I Putu Billy Herdiawan and I Gusti Ayu Agung Pradnya Dewi, “The Effect of Media Exposure, Type of Companies, and Environmental Performance on Carbon Emission Disclosure of Indonesia Companies,” *Review of Management, Accounting, and Business Studies* 1, no. 1 (2020), <https://doi.org/https://doi.org/10.38043/revenue.v1i1.2670>.

keuntungan, dimana akan lebih mementingkan terpenuhinya kepuasan masyarakat bukan untuk memenuhi kemauan birokrasi itu sendiri.⁵¹ Pemerintah sebagai regulator dapat memberikan preferensi dasar pada industri sebagai alat dalam mengatur seluruh kegiatan dan merupakan aspek kunci dalam menekan emisi karbon.⁵² Dalam peneliti ini, struktur kepemilikan BUMN dan non BUMN diproksikan sebagai regulator.

6. *Institutional Ownership (kepemilikan institusional)*

Institutional ownership dijabarkan sebagai kepemilikan saham suatu perusahaan yang dimiliki entitas seperti halnya perusahaan asuransi, perusahaan investasi, bank serta kepemilikan institusi yang lain.⁵³ Kepemilikan institusional akan memberikan pengawasan maksimal dan tekanan kepada manajemen untuk melaksanakan mengungkapkan tanggung jawab sosialnya terhadap lingkungan yang cukup besar pula.⁵⁴ Hal itu menandakan bahwa kepemilikan institusional memiliki fungsi sebagai pemantau manajemen karena dengan adanya kepemilikan institusional perusahaan akan lebih dorongan akan tanggung jawabnya mengenai pengungkapan emisi karbon.

Kim dan Lyon menunjukkan bahwa kesadaran tentang perubahan iklim kepada investor institusi dapat meningkatkan nilai pemegang saham dan kesadaran manajemen. Selain itu, kekuatan investor institusional dapat menciptakan tekanan pasar terhadap perusahaan untuk mengurangi emisi karbon mereka.⁵⁵ Investor institusi juga memasukkan resiko iklim ke dalam proses pengambilan keputusan mereka ketika pengungkapan emisi

⁵¹ Muhamad Labobo, *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, Teori, Konsep Dan Pembangunan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

⁵² Riska Firdaus, "Peran Pemerintah Daerah Sebagai Regulator, Dinamisator, Fasilitator, Dan Katalisator Dalam Pemberdayaan Petani Kakao Di Kabupaten Luwu Utara," *Publik Administrasi* 3, no. 1 (2020): 32–40.

⁵³ Tarjdo 2008

⁵⁴ I Amaliyah and B Solikhah, "Pengaruh Kinerja Lingkungan Dan Karakteristik Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon," *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology* 2, no. 2 (2019): 129–41, <https://doi.org/https://doi.org/10.32500/jematech.v2i2.720>.

⁵⁵ Ans Kolk, David Levy, and Jonatan Pinkse, "Corporate Responses in an Emerging Climate Regime: The Institutionalization and Commensuration of Carbon Disclosure," *European Accounting Review* 17, no. 4 (2008): 719–45, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1080/09638180802489121>.

karbon terjadi dan mereka akan mengalihkan investasi mereka ke perusahaan yang mempunyai kinerja iklim yang baik.⁵⁶

7. *Sharia Principles (Prinsip Syariah)*

Sharia principles adalah prinsip-prinsip hukum yang mengatur kehidupan umat yang berdasarkan pada ajaran agama islam.⁵⁷ Prinsip ini mencakup aspek kesadaran, keadilan, kesusilaan serta kesetiaan yang dapat mempengaruhi kehidupan. *Sharia principles* memiliki karakteristik yang meliputi keadilan, kesetiaan, kesadaran, kesusilaan, kebersihan, dan menyediakan rahmat bagi seluruh makhluk.

Islam adalah agama samawi dengan tiga prinsip dasar *Islamic worldview* yakni tauhid, khalifah, 'adalah (keadilan). Ketiga prinsip dasar tersebut mempunyai makna yang cukup luas dalam kehidupan manusia, termasuk dalam mengelola suatu entitas bisnis. Konsep tauhid menyatakan bahwa Allah SWT adalah satu-satunya tuhan yang menjadi dasar keimanan yang kuat untuk mempengaruhi cara manusia bertindak dalam kehidupannya. Selanjutnya konsep keadilan memberikan isyarat jika sumber daya yang telah tersedia untuk manusia harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk seluruh umat, konsep ini yang mengatakan bahwa adanya keadilan dan juga pertanggungjawaban sosial atas sumber daya yang diciptakan oleh Allah SWT. dan yang terakhir adalah konsep khilafah yang mengajarkan

Selain itu, pelaporan bisnis maupun keberlanjutan secara umum sepenuhnya dapat disesuaikan dengan prinsip syariah karena memiliki tujuan utama kesetaraan, keadilan, kewajiban dan sosial lingkungan⁵⁸ oleh karena itu, islam mengajarkan para penguasa dan pengusaha agar menekankan persaudaraan (ukhuwah), keadilan, sosial ekonomi, dan memuat kebutuhan spiritual manusia dan menuntut para penguasa untuk bertindak jujur, adil, dan amanah dalam upaya menciptakan kebahagiaan dan kehidupan yang baik bagi manusia.

⁵⁶ Adam Harmes, "The Limits of Carbon Disclosure: Theorizing the Business Case for Investor Environmentalism," *Global Environmental Politics* 11, no. 22 (2011): 98–119, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1162/GLEP_a_00057.

⁵⁷ Suhel, "ANALISIS PENAWARAN KREDIT PADA INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA," *JURNAL EKONOMI PEMBANGUNAN* 8, no. 1 (2019): 12–30.

⁵⁸ Riham Ragab Rizk, "Islamic Environmental Ethics," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 5, no. 2 (2014): 194–204, <https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2012-0060>.

Menurut *International Islamic Financial Market* (IIFM) prinsip syariah adalah seperangkat aturan dan pedoman yang mengatur kegiatan keuangan dan investasi sesuai dengan hukum islam.

8. *Environmental* (Lingkungan)

a) *Environmental committee* (komite lingkungan).

Sebuah perusahaan memerlukan perhatian yang khusus terhadap lingkungan sebagai wujud dari tanggung jawab dan kepedulian terhadap lingkungan.⁵⁹ Hal tersebut dapat diwujudkan melalui pembentukan komite lingkungan yang menjadi bagian dari anggota dewan, hal ini akan mengarahkan perusahaan secara sukarela dan kredibel dalam pengungkapan informasi terkait emisi gas rumah kaca (GRK) perusahaan.⁶⁰ Reputasi perusahaan akan meningkat dimata pemangku kepentingan jika terdapat komite lingkungan dalam perusahaan.⁶¹

Komite lingkungan memiliki tanggung jawab untuk menilai seberapa *urgently* laporan gas rumah kaca bagi masyarakat, pemerintah, dan stakeholder. Laporan ini membantu integrasi regulasi dan praktik bisnis yang terkait dengan pemanasan global.⁶² *Environmental committee* berperan sangat penting dalam pelaporan lingkungan (*environmental disclosure*) perusahaan.

b) *Environmental management system* (sistem manajemen lingkungan)

Selain pembentukan komite lingkungan berarti harus ada *environmental management system* yang jelas dalam perusahaan. Aspek lingkungan suatu perusahaan dihasilkan dari sistem manajemen lingkungannya. Kinerja lingkungan

⁵⁹ Fadli Andika Putra and Lindrianasari, “Kinerja Lingkungan Dan Tingkat Pengungkapan CSR Sebelum Dan Sesudah UU No 47 Tahun 2012,” *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 23, no. 1 (2020).

⁶⁰ Rankin, Windsor, and Wahyuni, “An Investigation of Voluntary Corporate Greenhouse Gas Emissions Reporting in a Market Governance System: Australian Evidence.”

⁶¹ David Annandale, Angus Morrison-Saunders, and George Bouma, “The Impact of Voluntary Environmental Protection Instruments on Company Environmental Performance,” *Business Strategy and the Environment* 13, no. 1 (2004): 2–17, <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/bse.390>.

⁶² Rankin, Windsor, and Wahyuni, “An Investigation of Voluntary Corporate Greenhouse Gas Emissions Reporting in a Market Governance System: Australian Evidence.”

dihasilkan dari pengelolaan lingkungan perusahaan melalui kebijakan, fasilitas, dan tujuan konservasi yang diukur dengan sistem manajemen lingkungannya.⁶³

Environmental management system adalah sarana untuk mengidentifikasi dan menjelaskan masalah, serta berfungsi sebagai pemecah masalah berdasarkan konsep berkelanjutan.⁶⁴ Standar ini dibuat oleh *The International Organization for Standarization* (ISO). Standar yang ditetapkan untuk lingkungan ini dapat disebut sebagai ISO 14001.⁶⁵ *Environmental management system* bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan lingkungan organisasi tidak hanya memiliki peran untuk lingkungan tapi juga untuk komunitas dan masyarakat.

B. Penelitian Terdahulu

Negara-negara maju seperti Australia Turki, Malaysia, dan Inggris telah mempelajari dan mengembangkan masalah terkait emisi karbon. Permasalahan perubahan iklim semakin parah mendorong terciptanya penelitian ini.. Penanganan emisi karbon adalah salah satu cara suatu perusahaan atau organisasi ikut andil dalam permasalahan perubahan iklim dunia.

Berikut adalah beberapa penelitian yang dilakukan para peneliti sebelumnya mengenai *carbon emission disclosure* dan komponen terkaitnya.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul	Hasil Penelitian
1.	Edfan Darlis, Pipin Kurnia, & Mudrika	<i>Carbon Emission Disclosure : A</i>	<i>Media exposure berpengaruh terhadap carbon emission disclosure.</i>

⁶³ Aspian Noor and Yoremia Lestari Ginting, “Influence of Carbon Emission Disclosure on Firm Value of Industrial Firms in Indonesia,” *International Journal of Contemporary Accounting* 4, no. 2 (2022): 151–68, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25105/ijca.v4i2.15247>.

⁶⁴ David Anandale, Angus Morrison-Saunders, and George Bouma, “The Impact of Voluntary Environmental Protection Instruments on Company Environmental Performance,” *Bussines Strategy and the Environment* 13, no. 1 (2004): 1--12, <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/bse.390>.

⁶⁵ Richard K Fleischman and Karen Schuele, “Green Accounting: A Primer,” *Journal of Accounting Education* 24 (2006): 35–66, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jaccedu.2006.04.001>.

	Alamsyah (2020)	<i>study on Manufacturing Companies of Indonesia and Australia</i> ⁶⁶	Sedangkan pertumbuhan perusahaan, Reputasi KAP, <i>Institutional Ownership</i> , dan <i>managerial ownership</i> tidak berdampak terhadap <i>carbon emission disclosure</i> .
	Persamaan : - Jenis penelitian yang diambil yaitu kuantitatif - Sampel yang dipakai menggunakan metode <i>purposive sampling</i> - Teknik analisis data yang dipakai sama yaitu analisis regresi linier berganda - Data yang dipakai merupakan laporan keuangan yang tergolong sebagai data sekunder <i>Institutional ownership</i> diproksikan sebagai variabel dependen pada <i>carbon emission disclosure</i> Perbedaan : - Pada penelitian ini populasi yang diambil merupakan perusahaan yang tergabung dalam <i>Asia Sustainability Report Rating</i> (ASSRAT) pelaporan tahun 2018-2022. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Edfan Darlis, Pipin Kurnia & Mudrika Alamsyah populasi yang diambil merupakan perusahaan sektor manufaktur yang terdapat di BEI dan TOP 100 perusahaan yang terdaftar di ASX pada tahun 2014-2016. - Variabel independen dalam penelitian ini yaitu aspek regulator, <i>Institutional ownership</i>, <i>sharia principles</i>, dan aspek <i>environmental</i>. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Darlis dkk variabel independen nya adalah media exposure, pertumbuhan perusahaan, reputasi KAP, dan kepemilikan manajerial.		
2.	Halil Emre Akbas dan Seda Canikli (2018)	<i>Determinant of Voluntary Greenhouse Gas Emission Disclosure: An Empirical</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, <i>institutional ownership</i> , dan nilai pasar berpengaruh positif. Sedangkan ukuran dewan

⁶⁶ Darlis, Kurnia, and Alamsyah, “*Carbon Emission Disclosure : A Study on Manufacturing Companies of Indonesia and Australia*”

		<i>Investigation on Turkish Firms</i> ⁶⁷	berhubungan negatif.
	Persamaan: - Data yang dipakai yaitu data sekunder berupa laporan keuangan. - Variabel <i>institutional ownership</i> dimasukkan menjadi variabel bebas yang diproksikan pada <i>carbon emission disclosure</i>. <i>Carbon emission disclosure</i> yang dijadikan sebagai fokus penelitian. Perbedaan: - Penggunaan variabel ukuran perusahaan, nilai pasar perusahaan dan ukuran dewan merupakan variabel independen dalam penelitian ini. - Populasi yang diambil dalam penelitian yaitu perusahaan yang tergabung dalam <i>Asia Sustainability Report Rating (ASSRAT)</i> periode pelaporan 2018-2022. Sedangkan pada penelitian Akbas dan Canikli menggunakan perusahaan yang tergabung dalam CDP-Turkey tahun 2014-2016.		
3.	Tommy Andrian dan Kevin (2021)	<i>Determinant Factors of Carbon Emission Disclosure in Indonesia</i> ⁶⁸	Green strategy, CSR, tata kelola perusahaan yang baik dan kinerja keuangan memiliki dampak positif terhadap <i>carbon emission disclosure</i> . Hal tersebut berbeda dengan dewan direksi dan <i>institutional ownership</i> yang justru tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap <i>carbon emission disclosure</i> .
	Persamaan: - Jenis data yang dipakai adalah laporan keuangan yang termasuk data sekunder. - Jenis penelitian yang bersifat kuantitatif. - Variabel <i>institutional ownership</i> dimasukkan menjadi variabel bebas yang diproksikan pada <i>carbon emission</i>		

⁶⁷ Akbas and Canikli, "Determinants of Voluntary Greenhouse Gas Emission Disclosure : An Empirical Investigation on Turkish Firms."

⁶⁸ Andrian and Kevin, "Determinant Factors Of Carbon Emission Disclosure In Indonesia."

	<i>disclosure.</i> Perbedaan : - Populasi yang diambil dalam penelitian yaitu perusahaan yang tergabung dalam <i>Asia Sustainability Report Rating (ASSRAT)</i> periode pelaporan 2021 dan 2022. Sedangkan pada penelitian Andrian & Kevin menggunakan data perusahaan industri barang konsumsi tahun 2015-2019. - Aspek regulator, <i>Institutional ownership</i>, <i>sharia principles</i>, dan aspek <i>environmental</i> merupakan variabel independen yang dipakai dalam penelitian ini. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Andrian & Kevin variabel independen nya adalah strategi hijau, pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, tata kelola perusahaan yang baik, kinerja keuangan, dewan direksi, dan kepemilikan institusional		
4.	B Solikhah, I F S Wahyuningrum, A Yulianto, E Sarwono, dan A K Widiatami (2021)	<i>Carbon Emission Disclosure Report: A Review Based on Environmental Performance, Company Age and Corporate Governance</i>⁶⁹	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa umur perusahaan, kepemilikan institusional, dan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon. Sedangkan kinerja lingkungan dan kepemilikan manajerial tidak memiliki dampak terhadap <i>carbon emission disclosure</i>.
	Persamaan : - Data penelitian yang dipakai adalah data sekunder yang berasal dari laporan keuangan - Jenis penelitiannya adalah Kuantitatif - Variabel kepemilikan institusional dimasukkan menjadi variabel bebas yang diprosikan pada <i>carbon emission disclosure</i>. Perbedaan : - Populasi yang diambil dalam penelitian adalah perusahaan yang tergabung dalam <i>Asia Sustainability Report Rating (ASSRAT)</i> periode pelaporan 2021 dan 2022. Sedangkan pada penelitian Solikhah dkk adalah perusahaan manufaktur		

⁶⁹ Solikhah et al., “Carbon Emission Report: A Review Based on Environmental Performance, Company Age and Corporate Governance”

	yang terdaftar di BEI 2012-2015 b. Variabel independen dalam penelitian ini adalah aspek regulator, <i>Institutional ownership</i>, <i>sharia principles</i>, dan aspek <i>environmental</i>. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Solikhah dkk variabel independen nya adalah umur perusahaan, kepemilikan institusional, komisaris independen, kinerja lingkungan, dan kepemilikan manajerial.		
5	Md. Abdul Kaium et al (2022)	<i>Corruption disclosure practices of islamic and conventional financial firms in Bangladesh: the moderating role of Big4</i> ⁷⁰	Perusahaan keuangan yang mengikuti prinsip syariah mempunyai hubungan negatif dan signifikan terhadap <i>corporate corruption disclosure</i> , sedangkan Big4 memiliki pengaruh positif dan signifikan.
	Persamaan : a. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif b. Data yang digunakan berupa laporan keuangan yang termasuk data sekunder. c. Penggunaan <i>sharia principles</i> sebagai variabel bebas. Perbedaan : a. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah <i>carbon emission disclosure</i>. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Md. Abdul Kailum et al. variabel dependen nya adalah <i>corporate corruption reporting</i> b. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang tergabung dalam <i>Asia Sustainability Report Rating (ASSRAT)</i> tahun 2021 dan 2022. Sedangkan dalam penelitian Md. Abdul Kailum et al. adalah perusahaan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Dhaka di Bangladesh tahun 2012-2016.		
6	Nur Afifah (2020)	Analisis Determinan Pengungkapan Emisi Karbon	Variabel <i>global reporting initiative (RI)</i> , reputasi kantor akuntan public (KAP), <i>environmental</i>

⁷⁰ Md Abdul Kaium Masud et al., “Corruption Disclosure Practices of Islamic and Conventional Financial Firms in Bangladesh: The Moderating Role of Big4,” *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 15, no. 1 (2024): 32–55, <https://doi.org/10.1108/JIABR-07-2021-0195>.

	(Perusahaan dalam Daftar Efek Syariah di Indonesia dan Malaysia Periode 2013-2018) ⁷¹	<i>management system</i> memiliki pengaruh secara positif signifikan di Malaysia dan Indonesia. Variabel <i>environmental committee</i> berpengaruh secara positif signifikan di Indonesia sedangkan di Malaysia tidak memiliki pengaruh. Variabel <i>leverage</i> memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan di Indonesia tetapi tidak memiliki pengaruh di Malaysia. Variabel <i>board size</i> dijabarkan tidak memiliki pengaruh di Indonesia tetapi berdampak secara positif dan signifikan di Malaysia dan serta diferensiasi tingkat kualitas <i>pengungkapan emisi karbon</i> di perusahaan yang ada di negara Indonesia dan Malaysia.
	Persamaan : - Jenis penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif. - Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis regresi linier berganda. - Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan. - Pengambilan sampel menggunakan metode <i>purposive sampling</i>. Perbedaan : - Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang tergabung dalam <i>Asia Sustainability Report Rating (ASSRAT)</i> tahun 2021 dan 2022. Sedangkan dalam penelitian Arifah & Haryono adalah perusahaan yang	

⁷¹ Arifah, “Analisis Determinan Pengungkapan Emisi Karbon (Perusahaan Dalam Daftar Efek Syariah Di Indonesia Dan Malaysia Periode 2013-2018).”

	terdaftar di Daftar Efek Syariah di Indonesia tahun 2013-2018. b. Variabel independen dalam penelitian ini adalah aspek regulator, <i>Institutional ownership</i>, <i>sharia principles</i>, dan aspek <i>environmental</i>. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Arifah & Haryanto variabel independen nya adalah. Komite lingkungan, ukuran dewan direksi, reputasi KAP, leverage, sistem manajemen lingkungan, GRI,		
7.	Firda Ananda Sari (2023)	Pengaruh Regulator, Kinerja Keuangan dan Tipe Industri terhadap Carbon Emission Disclosure (Studi Kasus pada Perusahaan yang Tercatat di BEI Tahun 2019-2021)⁷²	Regulator memiliki pengaruh yang signifikan dengan arah positif terhadap <i>carbon emission disclosure</i>. Kinerja keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>carbon emission disclosure</i>. Tipe industri memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>carbon emission disclosure</i>.
Persamaan : - Jenis penelitian yang dipakai yaitu kuantitatif - Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan - Pengambilan sampel yang digunakan menggunakan metode <i>purposive sampling</i> Perbedaan : - Populasi yang dipakai dalam penelitian ini yaitu perusahaan yang tergabung dalam <i>Asia Sustainability Report Rating (ASSRAT)</i> tahun 2021 dan 2022. Sedangkan dalam penelitian Firda Ananda Sari adalah perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021. - Aspek regulator, <i>Institutional ownership</i>, <i>sharia principles</i>, dan aspek <i>environmental</i> merupakan variabel independen yang dipakai dalam penelitian ini. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Arifah & Haryanto variabel independen nya adalah regulator, tipe industri, kinerja			

⁷² Firda Ananda Sari, “Pengaruh Regulator, Kinerja Keuangan Dan Tipe Industri Terhadap Carbon Emission Disclosure (Studi Kasus Pada Perusahaan Yang Tercatat Di Bei Tahun 2019-2021),” 2023.

	keuangan.		
8.	Licya Fransisca (2020)	Pengaruh Media Exposure, Tipe Industri, Profitabilitas, Regulator, Size, Leverage, dan kepemilikan institusional terhadap Carbon Emission Disclosure ⁷³	Pada penelitian ditemukan bahwa hanya ukuran perusahaan (size) saja yang mempengaruhi pengungkapan emisi karbon sedangkan variabel lainnya tidak berpengaruh pada pengungkapan emisi karbon.
	Persamaan : - Jenis penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif - Pemilihan sampel yang menggunakan metode <i>purposive sampling</i> - Data yang digunakan berupa laporan keuangan yang termasuk dalam data sekunder Perbedaan : - Populasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan perusahaan yang tergabung dalam <i>Asia Sustainability Report Rating (ASSRAT)</i> tahun 2021 dan 2022 . sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Fransisca adalah perusahaan non-keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018. - Variabel bebas dalam penelitian ini adalah aspek regulator, <i>institutional ownership</i>, <i>sharia principles</i>, dan aspek <i>environmental</i>. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan Fransisca menggunakan variabel independen yaitu <i>media exposure</i>, tipe industri, profitabilitas, regulator, <i>leverage</i>, kepemilikan institusional dan <i>size</i>.		
9.	Lin Liao, Le Luo, dan Qinliang Tang (2015)	<i>Gender Diversity, Board Independence, Environmental Committee and</i>	Hasil penelitian ini membuktikan bahwa gender diversity dan komite lingkungan memiliki pengaruh secara positif

⁷³ Fransisca, *Pengaruh Media Exposure, Tipe Industri, Profitabilitas, Regulator, Size, Leverage, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Carbon Emission Disclosure (Studi Pada Perusahaan Non Keuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 - 2018)*.

		<i>Greenhouse Gas Disclosure</i> ⁷⁴	terhadap pengungkapan emisi karbon. Sedangkan dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.
	Persamaan : - Jenis penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif - Data yang digunakan berupa laporan keuangan yang termasuk dalam data sekunder - Variabel <i>environmental committee</i> dimasukkan menjadi variabel bebas yang diprosikan pada <i>carbon emission disclosure</i> Perbedaan : - Populasi dalam penelitian ini merupakan perusahaan yang tergabung dalam <i>Asia Sustainability Report Rating (ASSRAT)</i> tahun 2021 dan 2022 . sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Liao et al adalah 329 perusahaan di Inggris. - Variabel bebas dalam penelitian ini adalah aspek regulator, <i>institutional ownership</i>, <i>sharia principles</i>, dan aspek <i>environmental</i>. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan Fransisca menggunakan variabel independen yaitu <i>gender diversity</i>, <i>board independence</i>, <i>environmental committee</i>.		
10.	Kilic dan Kuzey (2018)	<i>The Effect of Corporate Governance on Carbon Emission Disclosure</i> ⁷⁵	Direksi Keuangan dan komite lingkungan berpengaruh terhadap <i>carbon emission disclosure</i> . Sedangkan proporsi dewan direksi independen, keragaman gender tidak berpengaruh terhadap <i>carbon emission disclosure</i> .
	Persamaan : - Jenis penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif - Data yang digunakan berupa laporan keuangan yang		

⁷⁴ Liao, Luo, and Tang, “Gender Diversity, Board Independence, Environmental Committee and Greenhouse Gas Disclosure”

⁷⁵ Kılıç and Kuzey, “The Effect of Corporate Governance on Carbon Emission Disclosures: Evidence from Turkey”

	termasuk data sekunder Perbedaan : - Populasi yang diambil penelitian ini menggunakan perusahaan sektor yang terdaftar dalam <i>Asia Sustainability Report Rating</i> (ASSRAT) tahun 2021 dan 2022. Sedangkan dalam penelitian Kilic & Kuzey menggunakan perusahaan non-keuangan Turki yang terdaftar di Bursa Istanbul selama tahun 2011-2015. - Variabel independen dalam penelitian ini adalah aspek regulator, <i>institutional ownership</i>, <i>sharia principles</i>, dan aspek <i>environmental</i>. Sedangkan pada penelitian Pratiwi variabel independen nya meliputi direksi asing, komite lingkungan, ukuran dewan direksi, proporsi direksi independen dan keragaman gender.		
11.	Desy Nur Pratiwi (2018)	Implementasi <i>Carbon Emission Disclosure</i> di Indonesia ⁷⁶	Aspek Regulator dan kepemilikan institusional berpengaruh dan menjadi peran penting untuk mendorong perusahaan dalam pengungkapan emisi karbon. Hal ini berlainan dengan profitabilitas dan variabel ukuran perusahaan yang tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.
	Persamaan : - Jenis penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif - Pengambilan sampel yang menggunakan metode purposive sampling - Data yang digunakan berupa laporan keuangan yang termasuk data sekunder - Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda Perbedaan : - Populasi yang diambil penelitian ini menggunakan perusahaan sektor yang terdaftar dalam <i>Asia Sustainability Report Rating</i> (ASSRAT) tahun 2021 dan 2022. Sedangkan dalam penelitian Pratiwi menggunakan perusahaan manufaktur dan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun		

⁷⁶ Pratiwi, "Implementasi *Carbon Emission Disclosure* Di Indonesia."

	2012-2016. b. Variabel independen dalam penelitian ini adalah aspek regulator, <i>institutional ownership</i>, <i>sharia principles</i>, dan aspek <i>environmental</i>. Sedangkan pada penelitian Pratiwi variabel independen nya meliputi regulator, <i>institutional ownership</i>, profitabilitas dan ukuran perusahaan.
--	--

Sumber : Berbagai jurnal ,diolah 2023

Beberapa pembahasan mengenai *carbon emission disclosure* telah dilakukan oleh para peneliti seperti yang telah dijabarkan. Analisis mengenai pembahasan tersebut juga cukup beragam, mulai dari *Institutional Ownership*, Reputasi KAP, *Company's growth*, Dewan Komisaris, *Environmental Management System*, *Environmental Committee*, Regulator, Profitabilitas, *Leverage*, Nilai Pasar, *Sharia Principles*, Kinerja Lingkungan, Kinerja Keuangan, Tipe Industri, Umur Perusahaan, *Media Exposure*, *Green Strategy*, *Good Corporate Governance*, *Corporate Social Responsibility* dan *Industrial Membership*.

Beberapa penelitian terdahulu mencakup lingkup internasional, seperti di Australia, Bangladesh, Malaysia, Turki. Objek penelitian yang dikaji cukup beragam, mulai dari *Dhaka Stock Exchange in Bangladesh*, *Australia Stock Exchange 200 (ASX)*, perusahaan yang masuk dalam *Carbon Disclosure Project Survey 2014* di Turki, Daftar Efek Syariah (DES), *Sharia Advisory Council of the Securities Commission Malaysia*, dan *Indonesia Stock Exchange (IDX)*. Sedangkan subjek penelitian yang dilakukan dalam penelitian terdahulu juga cukup beragam seperti perusahaan manufaktur, perusahaan keuangan dan non keuangan, perusahaan industri, perusahaan pertambangan dan perusahaan makanan dan minuman. Sementara periode penelitian yang dilakukan berkisar antara tahun 2012 sampai tahun 2021.

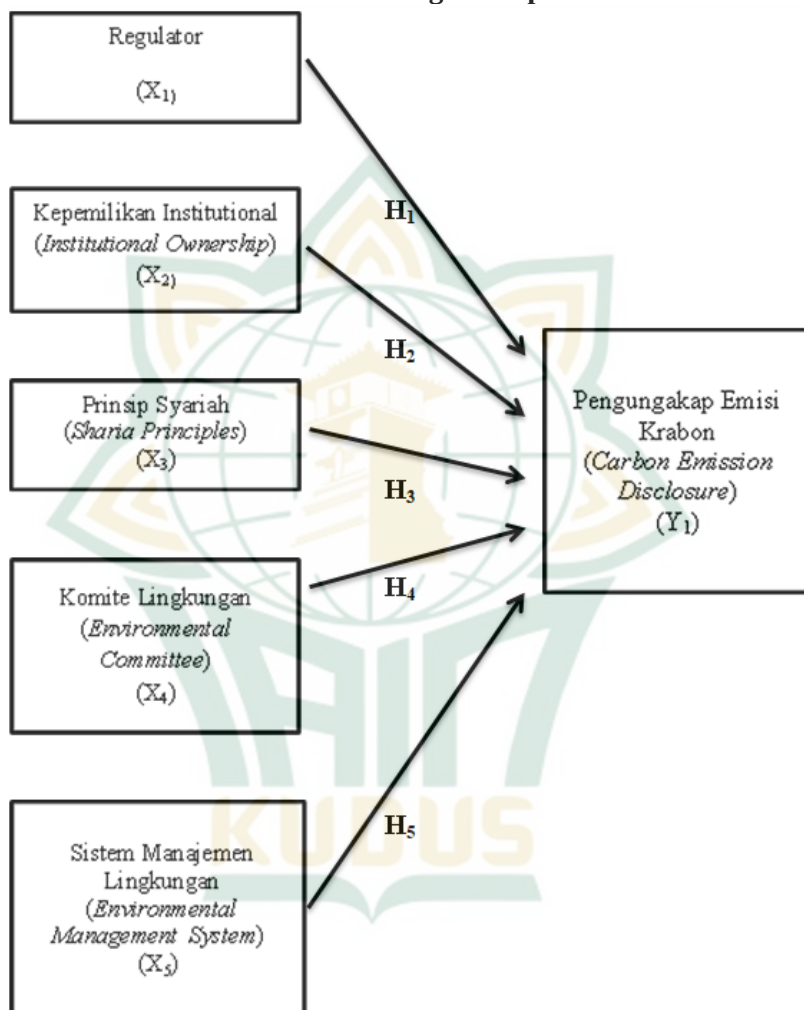
Berdasarkan uraian dari penelitian terdahulu maka bisa diketahui perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya yaitu terletak pada pembaruan penelitian yaitu periode tahun 2021-2022 dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perusahaan yang memiliki rating dalam *Asia Sustainability Report Rating (ASSRAT)*, dengan berbagai aspek yang menjadi novelty dalam penelitian ini yang diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih akurat sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.

C. Kerangka Berpikir

Berdasarkan uraian tentang evaluasi perusahaan dan landasan teori yang mendorong unsur pengaruh regulator, *institutional*

ownership, sharia principles, dan aspek lingkungan terhadap *carbon emission disclosure*, sehingga kerangka berpikir dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir



Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat bahwa aspek regulator, kepemilikan institutional (*institutional ownership*), Prinsip Syariah (*sharia principles*), aspek lingkungan (*environmental*) mempengaruhi penerapan pengungkapan emisi karbon (*carbon emission disclosure*) suatu perusahaan. Hal ini sejalan dengan teori yang dijabarkan sebelumnya, bahwa penerapan *carbon emission disclosure* dapat dipengaruhi oleh regulator, *institutional ownership* (kepemilikan institusional), *sharia principles* (prinsip sharia),

environmental committee (komite lingkungan), dan *environmental management system* (sistem manajemen lingkungan).

D. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban teoritik yang dalam penyusunannya berdasarkan pada teori yang ada, sehingga akan menimbulkan kesimpulan yang memerlukan suatu pengujian atas keabsahannya.⁷⁷ Untuk melakukan penelitian terkait masalah yang diajukan oleh penulis, maka hipotesisnya sebagai berikut:

1. Pengaruh Regulator Terhadap Penerapan *Carbon Emission Disclosure*

Perusahaan meyakini dengan melakukan pengungkapan laporan keberlanjutan mengenai lingkungan dengan keyakinan bahwa itu merupakan salah satu bukti dari rasa tanggung jawab dan untuk mendapatkan legitimasi dari para pemangku kepentingan.⁷⁸ Sebagai *eksternal stakeholder*, peran regulator (pemerintah) mempunyai wewenang dalam memberikan tuntutan atau penekanan terhadap perusahaan agar lebih memperdulikan lingkungan. Instansi pemerintah memiliki kewenangan melayangkan denda bahkan penutupan bisnis kepada perusahaan yang melanggar ketentuan dan regulasi terkait lingkungan.⁷⁹ Regulator yang membebankan tuntutan pada entitas perusahaan memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap pengungkapan lingkungan yang ada di perusahaan negara Taiwan. Hal tersebut juga sejalan dengan riset yang dilakukan oleh Liu dan Anbumozhi yang mengungkapkan bahwa regulator memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan lingkungan pada perusahaan di China.⁸⁰

Patten dan Trompeter membuktikan bahwa perusahaan yang melakukan pengungkapan lingkungan memiliki dampak

⁷⁷ Urip Santoso, *Kiat Menyusun Proposal Penelitian*, 1st ed. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 85.

⁷⁸ Pratiwi, "Implementasi Carbon Emission Disclosure Di Indonesia."

⁷⁹ Cheeng-Li Huang and Fan-Hua Kung, "Drivers of Environmental Disclosure and Stakeholder Expectation: Evidence from Taiwan," *Journal Of Business Ethics* 96, no. 3 (2010): 435–451, <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s10551-010-0476-3>.

⁸⁰ Xianbing Liu and V Anbumozhi, "Determinant Factors of Corporate Environmental Information Disclosure: An Empirical Study of Chinese Listed Companies," *Journal of Cleaner Production* 17, no. 6 (2009): 593–600, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2008.10.001>.

dalam pengurangan biaya regulator.⁸¹ Dalam hal ini dimaksudkan agar bisa menekan praktik politis yang buruk, karena semakin besar perusahaan maka akan semakin sensitive perilaku politis yang dilakukan. Hal tersebut akan berimbas kepada perusahaan yang menanggung harapan besar seperti tanggung jawab sosial, tekanan opini dari public, dan tuntutan lingkungan lainnya. Perusahaan besar bisa terus meningkatkan pengungkapan lingkungannya dengan dasar tekanan tersebut sebagai bentuk komunikasi antara lembaga pemerintah dan perusahaan untuk mencapai legitimasi sesuai yang diharapkan.⁸² Tekanan yang diberikan dari pemerintah akan menciptakan peran yang signifikan terhadap perusahaan agar selalu bertanggungjawab kepada lingkungan dan melakukan praktik pengungkapan lingkungan.⁸³

H1 : Aspek Regulator Berpengaruh Positif Terhadap Penerapan *Carbon Emission Disclosure*

2. Pengaruh *Institutional Ownership* (Kepemilikan Institusional) Terhadap *Carbon Emission Disclosure*

Institutional ownership merupakan presentase kepemilikan saham oleh pihak institusi yang dapat digunakan untuk mengontrol kinerja dari manajemen perusahaan dan dapat bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan secara langsung. Kepemilikan institusional mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap manajemen karena dengan adanya kepemilikan institusional akan mendorong tingkat pengawasan yang optimal.⁸⁴ Aktivitas perusahaan yang dilakukan sebagai upaya meningkatkan citra positif dari para stakeholder harus di *support* oleh *institutional ownership* yang besar yang difungsikan sebagai monitoring terhadap perusahaan sehingga seluruh aktivitas perusahaan dapat diungkapkan.⁸⁵

⁸¹ Denis M Patten and Greg Trompeter, "Corporate Responses to Political Costs: an Examination of The Relation Between Environmental Disclosure and Earnings Management," *Journal of Accounting and Public Policy* 22, no. 1 (2003): 83–94.

⁸² Huang and Kung, "Drivers of Environmental Disclosure and Stakeholder Expectation: Evidence from Taiwan."

⁸³ Andriadi and Werastuti, "Determinan Emisi Karbon Pada Sektor Industri Dan Manufaktur."

⁸⁴ Darlis, Kurnia, and Alamsyah, "*Carbon Emission Disclosure : A Study on Manufacturing Companies of Indonesia and Australia.*"

⁸⁵ Fransisca, *Pengaruh Media Exposure, Tipe Industri, Profitabilitas, Regulator, Size, Leverage, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Carbon*

Menurut Baek dalam Ghomi dan Leung perusahaan dengan tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan mendapatkan tekanan dari pemegang saham atau pemangku kepentingan, sehingga perusahaan akan mendapat laporan tambahan yang bersifat pengungkapan sukarela dan sesuai dengan teori *stakeholder*.⁸⁶ Menurut Elsayeh Omer mengungkapkan bahwa *institutional ownership* dan *managerial ownership* tidak berdampak terhadap *carbon emission disclosure*. Hal ini berbanding terbalik dengan Akhiroh Point dkk menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.⁸⁷

H2 : Institutional Ownership (Kepemilikan Institusional) Berpengaruh Terhadap Carbon Emission Disclosure

3. Pengaruh Sharia Principles (prinsip syariah) terhadap Carbon Emission Disclosure

Sharia principles adalah prinsip yang membentuk dasar hukum etika dalam kehidupan islam yang dapat mempengaruhi perusahaan dengan menerapkan prinsip syariah dalam praktek operasionalnya . Hal ini dikarenakan *sharia principles* mengacu pada tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat yang menjadi aspek penting dalam pengelolaan perusahaan. Perusahaan yang beroperasi dengan mematuhi prinsip syariah seperti dalam pengelolaan sumber daya alam, penggunaan sumber daya, dan pengelolaan lingkungan. Hal tersebut akan mempengaruhi perusahaan untuk berpikir mengenai pengurangan emisi karbon dan penggunaan energi yang efisien.

Prinsip syariah terhadap emisi karbon perusahaan telah menjadi topik yang cukup relevan dalam hal bisnis dan lingkungan. *karbon Sharia principles* akan mempengaruhi pengelolaan risiko dan strategi dalam pengembangan perusahaan. perusahaan akan disarankan untuk membangun sistem manajemen risiko yang mencakup beberapa aspek seperti aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola yang mencakup pengelolaan emisi karbon. Pengembangan berkelanjutan dengan wawasan

Emission Disclosure (Studi Pada Perusahaan Non Keuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 - 2018).

⁸⁶ Zahra Borghei Ghomi and Philomena Leung, "An Empirical Analysis of the Determinants of Greenhouse Gas Voluntary Disclosure in Australia," *Accounting and Finance* 2, no. 110–127 (2013).

⁸⁷ Titik Akhiroh and Kiswanto, "The Determinant OF Carbon Emission Disclosure," *Accounting Analysis Journal* 5, no. 4 (2016): 326–36.

lingkungan yang menganut prespektif islam dinilai dapat mempengaruhi pengungkapan emisi karbon.⁸⁸

H3 : Sharia Principles (Prinsip Sharia) Berpengaruh terhadap Carbon Emission Disclosure

4. Pengaruh Aspek *Environmental* (Lingkungan) terhadap *Carbon Emission Disclosure*.

Aspek lingkungan yang diambil disini adalah *environmental committee* dan *environmental management system*. Dimana kedua aspek ini adalah aspek penting yang harus ada dalam aspek *Environmental*. Kedua aspek ini yang akan mengatur strategi yang tepat untuk keadaan lingkungan.

4.1. *Environmental committee* (Komite Lingkungan)

Environmental committee adalah salah satu komponen yang dikembangkan oleh peneliti sebelumnya. *Environmental committee* mendorong agar perusahaan menggunakan strategi dalam pengungkapan lingkungan.⁸⁹ Oleh karena hal itu, *environmental committee* menjadi peran penting dalam pelaporan lingkungan suatu perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Liao dkk pada tahun 2015, Yunus dkk tahun 2016, dan Kilic & Kuzey di tahun 2018 menjelaskan bahwa *environmental committee* memiliki pengaruh yang positif terhadap *carbon emission disclosure*. Suatu perusahaan akan sukses besar pada pengungkapan emisi karbonnya apabila memiliki komite lingkungan yang berkelanjutan.⁹⁰ *Environmental committee* mempunyai tanggung jawab serta kebijakan mengenai masalah lingkungan. Berdasarkan deskripsi diatas, sebagai hasilnya peneliti mengembangkan hipotesis sebagai berikut:

H4 : *Environmental Committee* Berpengaruh Positif terhadap *Carbon Emission Disclosure*

⁸⁸ Nida Humaida et al., "Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan (Sustainable Development Goals) Dalam Perspektif Islam," *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 18, no. 1 (2020): 131, <https://doi.org/10.18592/khazanah.v18i1.3483>.

⁸⁹ Blake E Ashforth and Barrie Gibbs, "The Double-Edge of Organizational Legitimation," *Organization Science* 1, no. 2 (1990): 177-94, <https://doi.org/https://doi.org/10.1287/orsc.1.2.177>.

⁹⁰ Chandrasekhar Krishnamurti and Eswaran Velayutham, "The Influence of Board Committee Structures on Voluntary Disclosure of Greenhouse Gas Emissions: Australian Evidence," *Pasific Basin Finance Journal*, 2017, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2017.09.003>.

4.2. *Environmental Management System* (sistem manajemen lingkungan)

Dalam salah satu upaya pengelolaan lingkungan, peran dari *environmental management system* sangat penting dan diperlukan. Standar manajemen lingkungan yang telah diakui dunia internasional adalah ISO 14001. Perusahaan yang telah menggunakan *environmental management system* menunjukkan bahwa sistem akuntansi manajemen lingkungan dibuat untuk para manajer dan juga investor juga.⁹¹ Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yunus dkk membuktikan bahwa *environmental management system* berpengaruh positif yang signifikan terhadap *carbon emission disclosure*.⁹² Berdasarkan dari uraian diatas maka penelitian ini mengembangkan hipotesis sebagai berikut:

H5 : *Environmental Management System* Berpengaruh Positif Terhadap *Carbon Emission Disclosure*.

⁹¹ Rankin, Windsor, and Wahyuni, “An Investigation of Voluntary Corporate Greenhouse Gas Emissions Reporting in a Market Governance System: Australian Evidence.”

⁹² Somaiya Yunus, Evangelline O Eljido-Ten, and Subhash Abhayawansa, “Determinants of Carbon Management Strategy Adoption,” *Managerial Auditing Journal* 31, no. 2 (2016): 156–79, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1108/MAJ-09-2014-1087>.